

Merawat Kemerdekaan dengan Moderasi Beragama



Kontributor

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:38 WIB



Bernardus Agus Rukiyanto, S.J. (Dosen Universitas Sanata Dharma)

Setiap 17 Agustus, bendera Merah Putih berkibar di rumah-rumah ibadah, di sekolah-sekolah, kantor pemerintah, dan permukiman warga. Masyarakat dari berbagai agama mengikuti upacara, mengadakan doa bersama serta merayakan kemerdekaan dalam semangat persaudaraan.

Pemandangan tersebut mengingatkan kita bahwa Indonesia tidak dibangun oleh satu agama, suku, atau golongan. Kemerdekaan lahir dari perjuangan bersama orang-orang yang berbeda latar belakang, tetapi dipersatukan oleh cita-cita yang sama: menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Namun, kemerdekaan tidak selesai ketika penjajahan berakhir. Setiap generasi harus kembali memperjuangkannya dalam tantangan yang berbeda. Di tengah menguatnya politik identitas, penyebaran kebencian di media sosial, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama, salah satu tugas penting bangsa Indonesia saat ini adalah memerdekakan kehidupan beragama dari prasangka dan permusuhan.

Di sinilah moderasi beragama menemukan maknanya. Moderasi beragama bukan sekadar program pemerintah, melainkan merupakan kebutuhan bangsa untuk menjaga kemerdekaan dan keutuhan Indonesia.

Bukan Memoderasi Agama

Moderasi beragama sering disalahpahami sebagai upaya mengurangi keyakinan atau mencampuradukkan ajaran agama. Padahal, yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara manusia memahami dan menjalankan agama dalam masyarakat yang majemuk.

Seseorang dapat berpegang teguh pada ajaran agamanya sekaligus menghormati hak orang lain untuk meyakini dan menjalankan ajaran yang berbeda. Bahkan, semakin mendalam seseorang menghayati agamanya, semestinya semakin kuat pula penghormatannya terhadap martabat manusia.

Moderasi beragama menolak dua kecenderungan ekstrem. Pertama, sikap yang memaksakan keyakinan sendiri dan meniadakan hak kelompok lain. Kedua, sikap yang menganggap agama tidak relevan bagi pembentukan moral dan kehidupan bersama.

Jalan moderasi tidak berada dalam kelemahan atau keragu-raguan. Moderasi justru menuntut keteguhan iman yang disertai kerendahan hati: teguh dalam keyakinan, tetapi tidak merasa berhak merendahkan atau menyakiti orang lain.

Komitmen Kebangsaan

Salah satu indikator utama moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan. Agama dan nasionalisme tidak perlu dipertentangkan. Kecintaan kepada agama seharusnya menggerakkan seseorang untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Para pendiri negara menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan dapat dipertemukan dalam komitmen kepada Indonesia. Pancasila bukan milik satu kelompok, melainkan titik temu yang memungkinkan setiap warga hidup, beribadah, dan berkontribusi dalam kedudukan yang setara.

Karena itu, beragama secara moderat berarti menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus kebangsaan. Komitmen tersebut bukan hanya diucapkan dalam seremoni, tetapi diwujudkan dalam ketaatan kepada hukum, penghormatan terhadap hak warga negara, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bersama.

Komitmen kebangsaan diuji ketika identitas agama digunakan untuk membenarkan diskriminasi atau memecah masyarakat demi kepentingan politik. Agama seharusnya menjadi sumber etika publik, bukan alat untuk memenangkan kekuasaan dengan cara mempertentangkan warga.

Toleransi yang Aktif

Toleransi bukan sekadar membiarkan orang lain hidup di sekitar kita. Toleransi berarti mengakui bahwa orang yang berbeda mempunyai martabat dan hak yang sama sebagai warga negara.

Sikap ini tidak menuntut seseorang menyetujui seluruh ajaran agama lain. Toleransi juga bukan pencampuran keyakinan. Toleransi merupakan kesediaan memberi ruang kepada orang lain sebagaimana kita mengharapkan ruang bagi diri sendiri.

Namun, Indonesia memerlukan toleransi yang lebih aktif. Kita perlu bergerak dari sekadar tidak mengganggu menuju kemauan untuk berjumpa, berdialog, dan bekerja sama.

Persaudaraan lintas agama tidak cukup dibangun melalui pertemuan seremonial para tokoh, tetapi harus tumbuh di sekolah, kampus, lingkungan tempat tinggal, pasar, kantor, dan ruang digital. Umat dari berbagai agama dapat bekerja bersama mengatasi kemiskinan, memperbaiki lingkungan, membantu korban bencana, mendampingi kelompok rentan, dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

Perjumpaan semacam itu mengubah orang yang berbeda dari “mereka” menjadi “saudara”. Prasangka paling mudah tumbuh ketika manusia tidak pernah saling mengenal.

Menolak Kekerasan atas Nama Agama

Indikator berikutnya adalah antikekerasan. Tidak ada tujuan keagamaan yang dapat membenarkan teror, persekusi, perusakan rumah ibadah, intimidasi, atau pemaksaan keyakinan.

Kekerasan tidak selalu berbentuk serangan fisik. Ujaran kebencian, penghinaan terhadap simbol agama, penyebaran fitnah, pelabelan sesat secara serampangan, dan pengucilan sosial juga dapat melukai manusia serta merusak kehidupan bersama.

Ruang digital membuat kekerasan verbal menyebar jauh lebih cepat. Satu potongan video tanpa konteks dapat membangkitkan kemarahan. Informasi palsu tentang suatu kelompok dapat dibagikan ribuan kali sebelum kebenarannya diperiksa. Algoritma media sosial juga cenderung mempertemukan pengguna dengan pandangan yang sama sehingga mereka semakin sulit mendengar perspektif berbeda.

Karena itu, literasi digital merupakan bagian penting dari moderasi beragama. Sebelum membagikan informasi bermuatan agama, masyarakat perlu memeriksa sumber, konteks, dan dampaknya. Kebebasan berbicara tidak berarti kebebasan untuk merendahkan martabat orang lain.

Tokoh agama mempunyai tanggung jawab besar untuk menyejukkan keadaan. Mimbar keagamaan harus menjadi tempat menyampaikan kebijaksanaan, bukan membakar kebencian. Pemimpin agama harus hadir sebagai jembatan ketika terjadi ketegangan, bukan justru memperlebar perpecahan.

Menghargai Tradisi dan Kearifan Lokal

Moderasi beragama juga tampak dalam sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang selama berabad-abad menjadi ruang pertemuan antara agama dan kebudayaan.

Gotong royong, musyawarah, kenduri, *pela gandong*, *dalihan na tolu*, *subak*, dan berbagai bentuk kearifan lokal telah membantu masyarakat hidup bersama. Tradisi tersebut mengajarkan bahwa persaudaraan tidak selalu dibangun melalui teori besar. Tradisi itu sering tumbuh dari kebiasaan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Tentu, setiap komunitas agama berhak menilai tradisi berdasarkan ajarannya. Namun, perjumpaan dengan budaya tidak semestinya selalu dimulai dari kecurigaan. Kebudayaan dapat menjadi sarana untuk menerjemahkan nilai agama—seperti kasih, keadilan, keseimbangan, penghormatan, dan solidaritas—ke dalam kehidupan masyarakat.

Ketika agama tercerabut dari pengalaman konkret bangsa, akan mudah tampil sebagai identitas yang kaku. Sebaliknya, ketika agama berdialog secara kritis dan kreatif dengan kebudayaan, agama dapat menjadi kekuatan yang menghidupkan.

Dari Slogan Menuju Ekosistem

Moderasi beragama tidak cukup berhenti sebagai slogan, seminar, spanduk, atau kegiatan sesaat. Ia harus menjadi ekosistem yang dibangun melalui pendidikan, kebijakan, keteladanan, dan pengalaman nyata.

Sekolah dan madrasah perlu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal keragaman Indonesia. Pendidikan agama tidak cukup hanya mengajarkan apa yang harus dipercayai, tetapi juga bagaimana hidup bersama orang yang berbeda keyakinan.

Rumah ibadah perlu menjadi pusat penguatan persaudaraan dan pelayanan sosial. Keluarga harus mengajarkan anak untuk tidak menggunakan sebutan yang merendahkan kelompok lain. Aparatur negara wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Media perlu menghindari pemberitaan yang memperbesar ketegangan. Para tokoh politik harus berhenti menjadikan agama sebagai alat mobilisasi yang memecah warga.

Negara pun perlu hadir secara adil. Moderasi beragama tidak akan kuat apabila pelanggaran kebebasan beragama dibiarkan atau hukum diterapkan secara berbeda. Dialog penting, tetapi dialog harus disertai perlindungan hak konstitusional setiap warga.

Kemerdekaan untuk Hidup sebagai Saudara

Peringatan kemerdekaan seharusnya tidak hanya mengajak kita mengenang siapa yang dahulu berjuang melawan penjajahan. Peringatan ini juga harus membuat kita bertanya: apakah setiap warga hari ini telah merasa merdeka untuk beribadah, menyatakan identitasnya, dan hidup tanpa ketakutan?

Kemerdekaan belum utuh apabila seseorang harus menyembunyikan keyakinannya agar diterima. Kemerdekaan juga kehilangan makna ketika rumah ibadah dipersoalkan, kelompok minoritas diintimidasi, atau agama digunakan untuk membenarkan kebencian.

Indonesia tidak membutuhkan keseragaman. Indonesia membutuhkan warga yang dewasa dalam perbedaan: yakin tanpa memaksakan, taat tanpa membenci, kritis tanpa menghina, serta mencintai agamanya tanpa kehilangan kecintaan kepada bangsa.

Merawat kemerdekaan berarti merawat ruang bersama tempat seluruh warga dapat hidup secara bermartabat. Moderasi beragama menyediakan jalan untuk menjalankan tugas tersebut.

Merah Putih akan tetap berkibar bukan hanya karena dipasang pada tiang-tiang setiap Agustus. Merah Putih akan tetap tegak apabila masyarakat Indonesia bersedia menjaga persaudaraan, menolak kekerasan, menghormati perbedaan, dan bekerja bersama bagi keadilan.

Kemerdekaan diperjuangkan oleh keberanian para pendahulu. Kini, kemerdekaan harus dipelihara melalui kedewasaan kita hidup sebagai saudara. Dirgahayu Bangsa Indonesia. Merdeka!!!

Bernardus Agus Rukiyanto, SJ (Dosen Universitas Sanata Dharma)

Tags

HUT KEMERDEKAAN

MODERASI BERAGAMA

TOLERANSI

BERNARDUS AGUS RUKIYANTO